



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Atas Data Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2025. Laporan ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Semoga laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ini dapat bermanfaat.



Denpasar, 29 Januari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
I.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama	7
I.4. Landasan Hukum	7
I.5. Sistematika Penyajian	8
II PERENCANAAN KINERJA	
II.1. Visi	9
II.2. Misi	9
II.3. Tujuan dan Sasaran	10
II.4. Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program	11
II.5. Perjanjian Kinerja	12
III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
III.2. Realisasi Anggaran	34
IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	41
IV.2. Saran	41
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok “Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan”, mendukung misi Walikota Denpasar Ke 3 yaitu peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*). Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatnya sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah; yang ditopang dengan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak Daerah. Selanjutnya Tujuan dimaksud dijabarkan kedalam Sasaran yang ingin diwujudkan yaitu: (1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah; dan dengan Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja yaitu:

1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.018.795.135.284 terealisasi Rp. 2.220.122.658.663,55 atau dengan capaian sebesar 109,97%.

Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 59,60% terealisasi 62,31% atau dengan capaian sebesar 104,55%.

2. Dan atas dukungan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah ditargetkan sebesar 92,29% terealisasi sebesar 92,08% menjadi salah satu dukungan untuk peningkatan kinerja.

Dari capaian diatas menunjukkan bahwa secara umum Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan misi kota Denpasar. Untuk pencapaian kinerja yang diinginkan, didukung anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kota Denpasar Rp. 65.971.717.574 atau 92,19%.

I.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Mempunyai struktur Organisasi sebagai berikut :

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar :

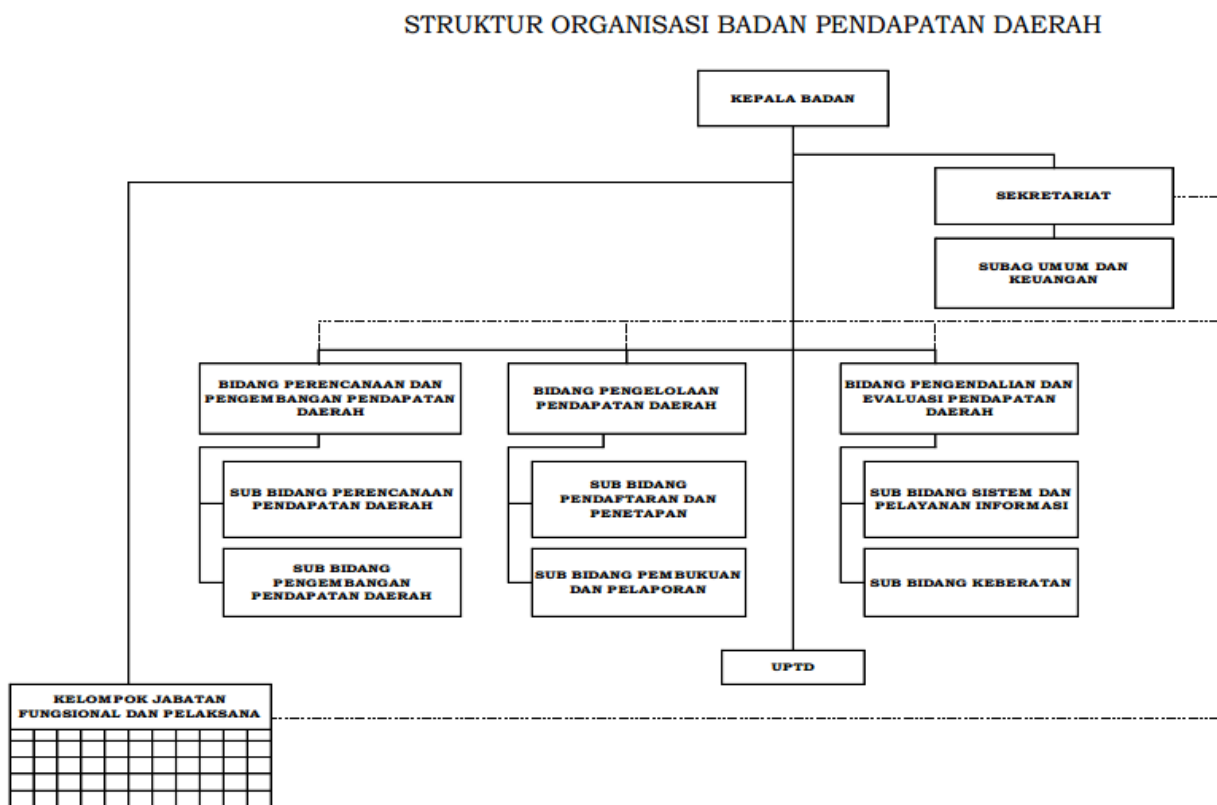
1. Kepala Badan
 - a. Jabatan Fungsional Perencana
 - b. Jabatan Fungsional Arsiparis
 - c. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Penagihan dan Penindakan
 - d. Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan Patda
 - b. Sub Bidang Pengembangan Patda
4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - a. Sub Bidang Sistem dan Pelayanan Informasi
 - b. Sub Bidang Keberatan

6. UPT Pengelolaan Pajak Daerah

a. Ka.UPT Pengelolaan Pajak Daerah

b. Ka.Sub.Bag Tata Usaha Pengelolaan Pajak Daerah

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :



Gambar 1.1

Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2025

Kelompok Pegawai	Jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN)	188 Orang
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris Badan	1 orang
Kepala Bidang	3 orang
Kepala UPT	1 orang
Kepala Sub Bagian	2 orang
Kepala Sub Bidang	6 orang
Jabatan Fungsional	5 orang
Staf	169 orang
Pegawai Non ASN	9 Orang
Tenaga Kontrak	9 Orang

NB : data Per 31 Desember 2025

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 197 orang yang terdiri dari 188 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 orang Non ASN.

Tabel 1.2
Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar
Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
	ASN		
1	Golongan II	4	2,13%
2	Golongan III	51	27,13%
3	Golongan IV	5	2,66%
4	PPPK IX	93	49,47%
5	PPPK VII	1	0,53%

6	PPPK V	33	17,55%
7	PPPK III	1	0,53%
TOTAL		188	100%
NON ASN			
1	Tenaga Kontrak	9	100%
TOTAL		9	100%

NB : data Per 31 Desember 2025

Berdasarkan Golongan ASN Bapenda Kota Denpasar memiliki golongan II sebanyak 4 Orang, golongan III sebanyak 51 Orang dan golongan IV sebanyak 5 orang, PPPK golongan IX sebanyak 93 orang, PPPK golongan VII sebanyak 1 orang, Pegawai PPPK golongan V sebanyak 33 orang, Pegawai PPPK golongan III sebanyak 1 orang serta pegawai Non ASN sebanyak 9 orang.

Tabel 1.3
Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
ASN			
1	S3	1	0,53%
2	S2	11	5,85%
3	S1	130	69,16%
4	DIII	1	0,53%
5	SMA	44	23,40%
6	SLTP	1	0,53%
TOTAL		188	100%
NON ASN			
1	S1	1	11,11%
2	SMA	7	77,78%
3	SD	1	11,11%
TOTAL		9	100%

NB : data Per 31 Desember 2025

Berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar yang memiliki pendidikan Doktor (S3) sebanyak 1 Orang, Magister (S2) sebanyak 11 orang, Sarjana (S1) sebanyak 130 orang, Diploma III (DIII) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 44 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Non ASN yang berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 7 orang dan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 1.4
Kondisi SDM Bapenda Kota Denpasar
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BERDASARKAN JENIS KELAMIN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
	ASN		
1	Laki-laki	110	58,51%
2	Perempuan	78	41,49%
TOTAL		188	100%
	NON ASN		
1	Laki-laki	8	88,89%
2	Perempuan	1	11,11%
TOTAL		9	100%

Berdasarkan jenis kelamin dari total 188 orang ASN di lingkungan Bapenda Kota Denpasar mayoritas berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 110 orang sisanya sebanyak 78 orang berjenis kelamin perempuan sedangkan untuk 9 orang Tenaga Non ASN jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 8 orang sedangkan sisa sebanyak 1 orang berjenis kelamin perempuan.

I.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota Denpasar, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Kota Denpasar sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;
2. Terwujudnya Kapasitas Keuangan Daerah yang kuat dalam APBD; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar dari sektor pajak daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bapenda Kota Denpasar tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan maupun kinerja pelayanan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian dan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah;
3. Masih rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi penerimaan daerah; dan
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

I.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang

I.5 Sistematika Penyajian

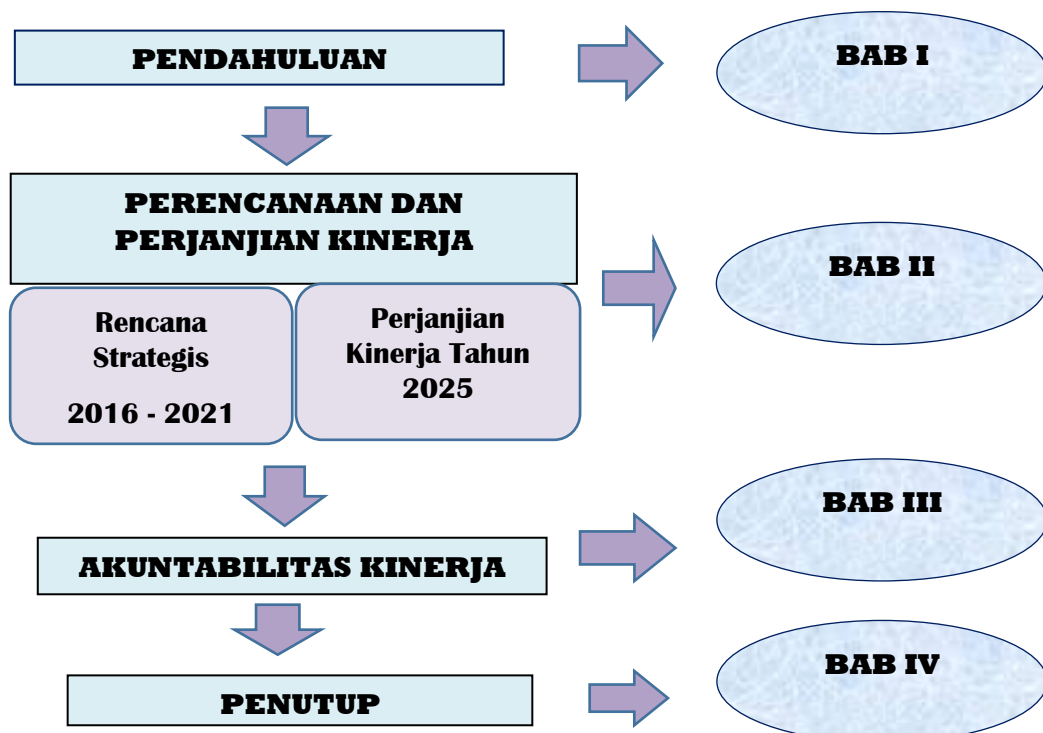
Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selama Tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, merupakan tolak ukur keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.2

Sistematika Penyajian LKJIP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang mana terlihat dari penajaman program pada Renstra 2016–2021. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

II.1 Visi

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan visi Pemerintahan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah

**“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM
KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN “**

II.2 Misi

Badan Pendapatan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi 3 pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 yaitu “Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*law enforcement*)”. Untuk

mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Melalui program tersebut Badan Pendapatan Daerah berkomitmen mendorong kemandirian fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan menuju **“Fiskal Kuat, Denpasar Maju”**.

II.3 Tujuan dan Sasaran

II.3.1 Tujuan

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan Kota Denpasar, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Dan dukungan atas Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah yang didasarkan pada pengukuran jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

II.3.2 Sasaran

Mengacu pada tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu dari tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	35%	35,94%	40,12%	40,25%	41,00%
			Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 657.068.247.868	Rp. 764.495.670.000	Rp. 855.153.180.000	Rp. 876.276.190.000	Rp. 957.329.620.000

Dengan ditetapkannya sasaran strategis dari tahun 2021-2025 seperti tertera pada tabel diatas maka untuk mewujudkan tujuan Bapenda yakni meningkatnya sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka ditetapkan persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebagai indikator kinerja dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang data di setiap target tiap tahunnya.

II.4 Penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program

Badan Pendapatan Daerah memiliki tujuan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Program

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase (%)	41,00%
			Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah (Rp)	Rp. 957.329.620.000

Program

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 80.664.664.378 |
| 2. Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 5.759.040.000 |

Berdasarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan maka dapat dilihat pada tabel 2.2 di tahun 2025 ditetapkan target sebesar 41% atau dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 957.329.620,00, berikut dengan besaran anggaran untuk program pendukung sebesar Rp. 80.664.664.378,00 dan besaran anggaran untuk program prioritas sebesar Rp. 5.759.040.000,00.

II.5 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, di tahun 2025 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar tanggal 2 Januari 2025 dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	957.329.620.000
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	41%

Berdasarkan tabel 2.3 diatas menampilkan sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pendapatan Darah Kota Denpasar dengan satuan (dalam juta rupiah) pada indikator jumlah penerimaan PAD sebesar Rp 957.329.620.000,- dan indikator kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan satuan persentase sebesar 41%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat menyebabkan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dengan pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dilakukan pergeseran Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dilakukanlah perubahan perjanjian kinerja 2025 pada tanggal 4 September 2025 yang diuraikan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Rp. 2.018.795.135.284
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	59,60%

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 58.363.527.574
2. Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp. 7.619.690.000

Dari penjabaran tabel 2.4 diatas ditetapkan target perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan indikator kinerja jumlah penerimaan PAD sebesar Rp. 2.018.795.135.284 dan indikator kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 59,60%. Hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian dengan kondisi terkini yang dimana jumlah penerimaan pendapatan mengalami peningkatan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan kinerja pemberi amanah. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 adalah laporan kinerja yang memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan penyusunan LKjIP yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Denpasar 2021-2026 dan Rencana Strategis Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

III.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja

Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.			
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Potensi PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi 2. Peningkatan Kualitas Data Wajib Pajak 3. Meningkatkan Koordinasi Dengan Instansi Terkait 4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – Sumber Potensi Pendapatan Daerah

III.1.2 IKU Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD Kota Denpasar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu pada misi 3 RPJMD Kota Denpasar (Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

MISI 3 :	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
Kejujuran dan Spirit Sewaka Dharma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan	Meningkatkan Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan potensi PAD
	Sasaran	Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD
	IKU	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	- Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah - Jumlah Penerimaan PAD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tentu tidak terlepas dari permasalahan - permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan maupun kinerja pelayanan. Adapun permasalahan – permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian dan pengawasan terhadap potensi Pendapatan Daerah.
3. Masih rendahnya kualitas data sehingga mempengaruhi penerimaan daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</p> <hr/> <p>Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya kebijakan daerah dengan regulasi dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah; - Sistem Operasional Prosedur (SOP) dalam tata kelola pelayanan pajak daerah dan dengan adanya ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Anti Suap); dan - Dilaksanakan Pengelolaan Pajak Daerah secara efektif efisien melalui inovasi salah satunya pengembangan sistem aplikasi SIMPADA (Pagi Denpasar). 	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak; - Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait; - Pemanfaatan teknologi dan update data yang belum optimal

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran strategis pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan targetnya.

Tabel. 3.4
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja										
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024				2025			
			Target	Target Perubahan	Realisasi	% Capaian	Target	Target Perubahan	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	40,25%	47,18%	52,67%	111,64%	41,00%	59,60%	62,31%	104,55%
	Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 876.276.190.000	Rp. 1.331.387.264.594	Rp. 1.643.621.163.062,75	123,45%	Rp. 957.329.620.000	Rp. 2.018.795.135.284	Rp. 2.220.122.658.663,55	109,97%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.018.795.135.284,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 2.220.122.658.663,55** dengan capaian kinerja sasaran yang diperoleh sebesar **109,97 %**. yang terdiri :

1. Pajak Daerah dengan realisasi sebesar	Rp. 1.874.480.234.470,48
2. Retribusi Daerah dengan realisasi sebesar	Rp. 193.858.951.259,51
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan realisasi sebesar	Rp. 100.261.240.483,21
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan realisasi sebesar	Rp. 51.522.232.450,35

Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 2.220.122.658.663,55 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp. 1.643.621.163.062,75 Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp. 576.501.945.600,80 atau 74,03% dari Tahun 2024.

Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 dapat digambarkan dalam Grafik 3.1



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa Tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	35%	35,94%	40,12%	40,25%	41,00%	40,28%	42,16%	48,14%	52,67%	62,31%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 657.068.247.868	Rp. 764.495.670.000	Rp. 855.153.180.000	Rp. 876.276.190.000	Rp. 957.329.620.000	Rp. 795.947.093.834,92	Rp. 888.025.219.497,36	Rp. 1.198.372.000.165,54	Rp. 1.643.621.163.062,75	Rp. 2.220.122.658.663,55

Dilihat dari komposisi persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari target tahun 2021 sebesar 35% dengan target jumlah penerimaan PAD Rp. 657.068.247.868 terealisasi sebesar 40,28% berjumlah Rp. 795.947.093.834,92, dilanjutkan di target tahun 2022 35,94% dengan target jumlah penerimaan PAD Rp. 764.495.670.000 terealisasi 42,16% berjumlah Rp. 888.025.219.497,36, target tahun 2023 40,12% dengan target jumlah penerimaan PAD Rp. 855.153.180.000 terealisasi sebesar 48,14% berjumlah Rp. 1.198.372.000.165,54, kemudian target tahun 2024 40,25% dengan jumlah target penerimaan PAD Rp. 876.276.190.000 terealisasi sebesar 52,67% sejumlah Rp. 1.643.621.163.062,75 dan target di tahun 2025 sebesar 41% dengan jumlah target penerimaan PAD Rp. 957.329.620.000 terealisasi 62,31% sejumlah Rp. 2.220.122.658.663,55.

Tabel 3.6

**Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025**

PAD	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025
Pajak Daerah	521.849.341.929,64	690.247.999.670,16	967.587.501.944,79	1.395.584.137.168,51	1.874.480.234.470,48
Retribusi Daerah	23.552.907.074,00	19.995.242.813	21.741.996.411	22.486.748.295	193.858.951.260
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.948.291.794,20	43.605.949.689,72	56.049.387.890,89	75.729.806.844,40	100.261.240.483,21
Lain-lain PAD yang Sah	196.596.553.037,08	134.176.027.324,48	152.993.113.918,86	149.820.470.754,84	51.522.232.450,35
Jumlah Penerimaan PAD	795.947.093.834,92	888.025.219.497,36	1.198.372.000.165,54	1.643.621.163.062,75	2.220.122.658.663,55

Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah dan Retribusi Daerah. Adapun realisasi penerimaan Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Reklame	Rp.	5.942.623.658,52
2. Pajak Air Tanah	Rp.	8.806.491.718
3. Pajak Bumi dan Bangunan P2	Rp.	130.536.855.292
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Rp.	300.203.239.466
5. PBJT-Makanan dan/atau Minuman	Rp.	404.559.795.869,86
6. PBJT-Tenaga Listrik	Rp.	257.035.821.724
7. PBJT-Jasa Perhotelan	Rp.	278.900.768.097
8. PBJT-Jasa Parkir	Rp.	7.750.517.503
9. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	Rp.	57.654.244.842,10
10. Opsen Kendaraan Pajak Bermotor (PKB)	Rp.	251.300.400.900
11. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp.	171.789.475.400

Tabel 3.7
Realisasi Pajak Daerah
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

PAJAK DAERAH (2021-2024)	PAJAK DAERAH (2025)	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025
Pajak Hotel	PBJT-Jasa Perhotelan	16.060.784.468,39	82.367.382.710,04	190.101.438.505,83	247.585.835.065,12	278.900.768.097,00
Pajak Restoran	PBJT-Makanan dan Minuman	83.211.179.126,88	164.305.556.851,37	268.048.400.338,40	346.419.958.151,07	404.559.795.869,86
Pajak Hiburan	PBJT-Jasa Kesenian	5.451.725.774,87	16.140.441.402,45	30.083.002.934,62	46.728.695.078,69	57.654.244.842,10
Pajak Reklame	Pajak Reklame	1.577.113.603,50	3.119.622.242,30	4.361.511.109,94	4.327.899.436,63	5.942.623.658,52
PPJ	PBJT-Tenaga Listrik	87.445.313.141,00	96.019.513.737,00	108.472.831.563,00	234.622.379.925	257.035.821.724
Pajak Parkir	PBJT-Jasa Parkir	5.683.724.645,00	6.860.767.280,00	7.581.448.580,00	6.982.216.990	7.750.517.503
Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	3.996.066.532,00	6.342.002.090,00	8.635.816.993,00	9.183.345.618	8.806.491.718
PBBP2	PBBP2	105.617.385.655,00	113.413.783.878,00	111.576.884.592,00	131.067.019.803	130.536.855.292
BPHTB	BPHTB	212.806.048.983,00	201.678.929.479,00	238.726.167.328,00	368.666.787.101	300.203.239.466
	PKB					251.300.400.900
	BBNKB					171.789.475.400
Total Pajak Daerah	Total Pajak Daerah	521.849.341.929,64	690.247.999.670,16	967.587.501.944,79	1.395.584.137.168,51	1.874.480.234.470,48



Tabel 3.8
Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	104,55%	59,60%	175,41%
	Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 2.220.122.658.663,55	Rp. 2.018.795.135.284	109,97%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2025 ditetapkan sebesar 104,55% dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Data :

- Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025
Rp. 2.220.122.658.663,55
- Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.562.778.417.859,95

dari data diatas maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\frac{2.220.122.658.663,55}{3.562.778.417.859,95} \times 100 = 62,31\%$$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Tahun 2025 :

$$\frac{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$$

Perhitungan :

$$\frac{62,31}{59,60} \times 100 = \underline{104,55\%}$$

Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar **59,60%** dapat direalisasikan sebesar **62,31%** atau 104,55% dari target yang ditetapkan. Apabila Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar **62,31%** dibandingkan dengan kontribusi PAD Tahun 2024 sebesar **52,67%** Kontribusi PAD Tahun 2025 mengalami Peningkatan sebesar **9,64%** dari Tahun 2024 Peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Peningkatan/Penurunan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024	TAHUN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	52,67%	62,31%	9,64%

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, menggambarkan seberapa besar peran PAD dalam total Penerimaan Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Pendapatan Daerah berarti semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya dapat mandiri.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi, Standar Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi Bali	Standar Kabupaten Badung	Standar Kabupaten Gianyar	% Capaian dengan Provinsi Bali	% Capaian dengan Kabupaten Badung	% Capaian dengan Kabupaten Gianyar
1	2	3	4	5	6	9	7=4/5*100	8=4/6*100	10=4/9*100
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	62,31%	65,66%	92,86%	62,77%	94,89%	67,10%	94,89%
	Sasaran : Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp2.220.122.658.663,55	Rp4.628.431.778.478,25	Rp8.018.129.177.900,05	Rp1.997.461.804.382,66	47,96%	27,69%	111,48%

Sumber Data: Laporan PAD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.10 perbandingan realisasi kinerja berdasarkan jumlah penerimaan PAD Kota Denpasar sebesar Rp. 2.220.122.658.663,55 dengan Provinsi Bali sebesar Rp. 4.628.431.778.478,25, Kabupaten Badung sebesar Rp. 8.018.129.177.900,05 dan kabupaten Gianyar sebesar Rp. 1.997.461.804.382,66 pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup positif, terutama jika dibandingkan dengan Kabupaten Gianyar. Namun, masih terdapat ruang peningkatan yang besar untuk mendekati standar Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, khususnya melalui optimalisasi sumber PAD, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah.

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	59,60%	62,31%	104,55%	Melebihi target	Untuk lebih ditingkatkan kembali
	Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp2.018.795.135.284,00	Rp2.220.122.658.663,55	109,97%	Melebihi target	Untuk lebih ditingkatkan kembali

Berdasarkan Tabel 3.11 tersebut menunjukkan kinerja peningkatan PAD sangat berhasil karena mampu melampaui target yang sudah ditetapkan. Analisis keberhasilan, kegagalan serta solusi dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 104,55% dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 2.220.122.658.663,55 yang menunjukkan tingkat keberhasilan serta untuk lebih meningkatkan strategi pengelolaan dan optimalisasi PAD agar capaian positif ini dapat berkelanjutan.

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)


No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian%	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	59,60%	62,31%	104,55%	Rp65.971.717.574	Rp60.816.162.725	92,19%	Efisien

Analisa terhadap tabel 3.12 diatas yakni penggunaan anggaran yang telah efisien dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 65.971.717.574,00.dan realisasi Rp. 60.816.162.725,00 serta persentase capaian 92,19%. Kinerja program dalam meningkatkan PAD dapat dinilai sangat baik, karena target indikator tercapai dengan efisiensi anggaran yang memadai.

Adapun dalam proses penerimaan Pendapatan dalam sektor Pajak Daerah Tahun 2025 dilakukan pengembangan inovasi yang salah satunya menjadi faktor pendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah. Inovasi-inovasi tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13
Inovasi – inovasi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025





No.	Inovasi	Keterangan	Sudah / Belum Dilaksanakan	Bukti Dukung
1	Gen Dental Jumat Gelatik	Program yang menyasar kaum milenial pelajar Kota Denpasar (launching pada saat HLM 4 Juli 2025)	Sudah	
2	Paon Gatsu	Inovasi Paon Gatsu mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor keuangan daerah serta optimalisasi penerimaan pajak di Kawasan Jalan Gatot Subroto. (launching pada saat HLM 4 Juli 2025)	Sudah	

3	Kladi 5 B	Klaster digital “Kladi 5 B” ini merupakan pengembangan ekosistem transaksi digital untuk memperluas layanan dan meningkatkan pergerakan ekonomi serta keuangan Kota Denpasar di Kawasan Jalan Tukad Badung, Tukad Barito, Tukad Batanghari, Tukad Balian dan Tukad Banyumas (launching pada tanggal 29 Oktober 2025)	Sudah	
---	-----------	--	-------	---

Dalam mendukung pelayanan dan terwujudnya inovasi-inovasi yang ada, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah melakukan peningkatan kualitas dari segi Sumber Daya Manusianya seperti yang tertera pada table 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14

No.	Kegiatan	Bukti Dukung
1	Capacity Building Pelaksanaan Opsen Pajak Daerah ke Kementerian Dalam Negeri	
2	Capacity Building tenaga lapangan terkait Opsen Pajak Daerah ke Yogyakarta	

2	Rapat Koordinasi Triwulan II	 <p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari / Tanggal : Rabu, 14 April 2022 Waktu Rapat : 11.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Gedung Barat Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Acara : Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Pimpinan Rapat : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Peserta Rapat : Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah, Kasubag. Umum dan Keuangan, Ka. Subid. Perencanaan Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pendaftaran & Penetapan, Ka. Subid. Pembukuan Pelaporan, Ka. Subid. Sistem & Pelayanan Informasi, Ka. Subid. Keberatan, JFT Perencana Ahli Muda, JFT Analis Kebijakan Ahli Muda, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima.</p> <p>Hasil Rapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan status administrasi pada Tahun 2021 2. Penetapan target Triwulan I 3. Penyelesaian sisa Cashflow dalam manajemen anggaran kas <p>4. Fokuskan pada pemenuhan MBROD yang masih secara riil, dan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.</p> <p>Mengetahui Rapat  Ditandatangani dan Disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Drs. Irena Widiyastuti, S.P., M.P.</p>
3	Rapat Koordinasi Triwulan III	 <p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari / Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2025 Waktu Rapat : 10.00 Wita - selesai Tempat : Ruang Rapat Gedung Barat Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Acara : Rapat Evaluasi dan Koordinasi Triwulan III Tahun 2025 Pimpinan Rapat : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Peserta Rapat : Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah, Kasubag. Umum dan Keuangan, Ka. Subid. Perencanaan Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pengembangan Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pendaftaran & Penetapan, Ka. Subid. Pembukuan Pelaporan, Ka. Subid. Sistem & Pelayanan Informasi, Ka. Subid. Keberatan, JFT Perencana Ahli Muda, JFT Perencana Ahli Pertama, JFT Analis Kebijakan Ahli Muda, JFT Arsparis Ahli Pertama, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengguna, Analis Perbendaharaan.</p>
4	Rapat Koordinasi Triwulan IV	 <p>PEMERINTAH KOTA DENPASAR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR</p> <p>NOTULEN RAPAT</p> <p>Hari / Tanggal : Kamis, 7 Agustus 2025 Waktu Rapat : 13.00 Wita - selesai Tempat : Ruang Rapat Gedung Barat Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Acara : Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Pendapatan Tahun 2025 Pimpinan Rapat : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Peserta Rapat : Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kepala UPT Pengelolaan Pajak Daerah, Kasubag. Umum dan Keuangan, Ka. Subid. Perencanaan Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pengembangan Pendapatan Daerah, Ka. Subid. Pendaftaran & Penetapan, Ka. Subid. Pembukuan Pelaporan, Ka. Subid. Sistem & Pelayanan Informasi, Ka. Subid. Keberatan, JFT Perencana Ahli Muda, JFT Perencana Ahli Pertama, JFT Analis Kebijakan Ahli Muda, JFT Arsparis Ahli Pertama, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Pembantu Bendahara Pengguna, Analis Perbendaharaan.</p>

SASARAN STRATEGIS

Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dengan indikator Indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 9 unsur penilaian seperti :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penangan pengaduan, sarana dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Dari survey yang dilakukan, capaian nilai indek kepuasan masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah diperoleh sebesar **92,08** capaian tersebut sudah memenuhi atas target IKM Kota Denpasar yang ditetapkan yaitu sebesar nilai **92,29** dengan persentase capaian sebesar **99,77%** . Apabila Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar **92,08** mengalami peningkatan sebesar **0,03** dari Tahun 2024 sebesar **92,05** adapun peningkatan tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16

**Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	84,39	86,26	88,24	92,05	92,08

Tabel 3.17

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	104,55%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	92,59%	Menunjang
	Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109,97%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	89,09%	Menunjang

Pada tabel 3.17 diatas dapat dijelaskan bahwa analisa dari keberhasilan dan kegagalan disetiap program yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian yang dihasilkan yaitu sudah menunjang, dengan uraian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota indikator kinerja persentase pemenuhan layanan kesekretariatan dengan capaian 92,59% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah indikator kinerja persentase realisasi PAD dengan capaian 89,09%.

III.2 Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja. Untuk tahun 2025 belanja terealisasi sebesar Rp. 60.816.162.725,00 atau 92,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 65.971.717.574,00.

Belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Target dan realisasi Program/kegiatan
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	58.352.027.574	54.027.752.869	92,19%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.525.514.341	41.835.180.664	93,96%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.525.514.341	41.835.180.664	93,96%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	575.395.150	496.593.316	86,30%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.555.500	15.972.000	96,48%

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	264.775.250	210.550.686	79,52%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.435.000	38.972.000	8972,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	215.383.400	209.703.150	97,36%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.280.000	14.450.400	83,63%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.966.000	6.945.080	38,66%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.945.551.709	6.848.440.340	86,19%
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	7.945.551.709	6.848.440.340	86,19%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.773.283.374	3.457.248.469	91,62%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	271.589.100	256.002.635	94,26%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	646.960.000	466.005.039	72,03%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.854.734.274	2.735.240.795	95,81%

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.532.283.000	1.390.290.080	90,73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	929.688.000	826.668.680	88,92%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.695.000	143.959.300	79,67%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	100,00%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	366.900.000	364.717.100	99,41%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	19.945.000	99,73%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100%

2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.619.690.000	6.788.409.856	89,09%
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.619.690.000	6.788.409.856	89,09%
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	974.900.000	908.34.190	93,17%
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.467.750.000	1.453.113.000	99,00%
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	582.870.000	579.247.500	99,38%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.150.000	3.150.000	100,00%
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	4.033.920.000	3.319.055.606	82,28%
	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	557.100.000	525.502.560	94,33%
	Total	65.971.717.574	60.816.162.725	92,19%

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 44.525.514.341,- pada anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 41.835.180.664,- atau sebesar 93,96%.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 16.555.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 15.972.000,- atau sebesar 96,48%.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 264.775.250,- dan direalisasikan sebesar Rp. 210.550.686,- atau sebesar 79,52%.
4. Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 43.435.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 38.972.000,- atau sebesar 89,72%.
5. Sub Kegiatan Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 215.383.400,- dan direalisasikan sebesar Rp. 209.703.150,- atau sebesar 97,36%.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp. 17.280.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 14.450.400,- atau sebesar 83,63 %.
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 17.966.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 6.945.080,- atau sebesar 38,66%.
8. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 7.945.551.709,- dan direalisasikan sebesar Rp. 6.848.440.340,- atau sebesar 86,19%.
9. Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat dianggarkan sebesar Rp. 271.589.100,- pada anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 256.002.635,- atau sebesar 94,26%.
10. Sub Kegiatan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 646.960.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 466.005.039- atau sebesar 72,03 %.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 2.854.734.274,- pada anggaran direalisasikan sebesar Rp. 2.735.240.795,- atau sebesar 95,81%.

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 929.688.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 826.668.680,- atau sebesar 88,92%.
13. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 180.695.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 143.959.300,- atau sebesar 79,67%.
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Tak berwujud dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 30.000.000 atau sebesar 100%.
15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 366.900.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 364.717.100,- atau sebesar 99,41%.
16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 19.945.000,- atau sebesar 99,73%.
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp.5.000.000 atau sebesar 100%.
18. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 974.900.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 908.341.190,- atau sebesar 93,17%.
19. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.467.750.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 1.453.113.000,- atau sebesar 99,00%.
20. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 582.870.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 579.247.500,- atau sebesar 99,38%.
21. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 3.150.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.150.000,- atau sebesar 100%.

22. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.033.920.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.319.055.606,- atau sebesar 82,28%.
23. Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 557.100.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 525.502.560,- atau sebesar 94,33%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang tersusun ini merupakan pertanggung jawaban Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2025. Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah - langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa - masa mendatang.

IV.1 Simpulan

Dari hasil analisa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar di peroleh kesimpulan:

1. Pencapaian kinerja secara umum, mencapai hasil sebagaimana ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya.
2. Anggaran / Dana sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana diprogramkan, dalam merealisasikan kegiatan dapat dialokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.

IV.2 Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan pajak daerah serta berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.



Denpasar, 29 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN		ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV		URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	41%	41%	41%	41%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	5.759.040.000	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
		Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rp. 95.732.962.000	Rp. 143.599.443.000	Rp. 239.332.405.000	Rp. 478.664.810.000					

Denpasar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Walikota Denpasar,
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Jumlah Penerimaan PAD	41% Rp. 957.329.620.000

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 5.759.040.000	
2. Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 80.664.664.378	Pendukung

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 4 September 2025
Pihak Pertama,
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Walikota Denpasar,
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 4 September 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar
Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Jumlah Penerimaan PAD	59,60% Rp. 2.018.795.135.284

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 7.619.600.000	
2. Program Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.363.527.574	Pendukung

IKU TAHUN 2025

Triwulan I

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun: Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	41%	63,17%	154,08%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	957.329.620.000	514.119.425.701,19	53,71%

Jumlah seluruh Anggaran Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Rp. 82.970.351.669

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 10.352.013.718

Denpasar, 11 April 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. H. Eddy Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Perhitungan Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target : 41%

Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah : Rp. 514.119.425.701,39

Realisasi Pendapatan Daerah : Rp. 813.972.024.093,79

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{514.119.425.701,39}{813.972.024.093,79} \times 100 = 63,17\%$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan:

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{63,17\%}{41\%} \times 100 = 154,08\%$

Indikator Kinerja: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp. 957.329.620.000

Realisasi : Rp. 514.119.425.701,39

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{514.119.425.701,39}{957.329.620.000} \times 100 = 53,71\%$

Triwulan II

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun: Triwulan II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	41%	62,63%	152,76%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	957.329.620.000	1.017.655.203.044,60	106,31%

Jumlah seluruh Anggaran Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Rp. 86.722.367.493

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 21.698.259.266

Denpasar, 7 Juli 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

Dr. H. Eddy Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Perhitungan Perjanjian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target : 41%

Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah : Rp. 1.017.655.203.044,60

Realisasi Pendapatan Daerah : Rp. 1.625.073.528.623,00

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{1.017.655.203.044,60}{1.625.073.528.623,00} \times 100 = 62,63\%$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan:

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{62,63\%}{41\%} \times 100 = 152,76\%$

Indikator Kinerja: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp. 957.329.620.000,00

Realisasi : Rp. 1.017.655.203.044,60

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{1.017.655.203.044,60}{957.329.620.000} \times 100 = 106,31\%$

Triwulan III

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun : Triwulan III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	41%	120.24%	293.27%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	957.329.620.000	1.645.808.012.569,88	171.92%

Jumlah seluruh Anggaran Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Rp. 65.983.217.574

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 35.242.461.261,00

Denpasar, 10 Oktober 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Perhitungan Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target : 41%
Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah : Rp. 1.645.808.012.569,88
Realisasi Pendapatan Daerah : RP. 1.368.781.486.653,27

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{1.645.808.012.569,88}{1.368.781.486.653,27} \times 100 = 120.24\%$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan:

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{120.24\%}{41\%} \times 100 = 293.27\%$

Indikator Kinerja: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp. 957.329.620.000,00
Realisasi : Rp. 1.645.808.012.569,88
Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{1.017.655.203.044,60}{957.329.620.000} \times 100 = 171.92\%$

Triwulan IV

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Badan Pendapatan Daerah
Tahun: Triwulan IV Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	59,60%	62,31%	104,55%
	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	2.018.795.135.284	2.220.122.658.663,55	109,97%

Jumlah seluruh Anggaran Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Rp. 65.971.717.574

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 Rp. 54.293.094.452

Denpasar, 7 Januari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Dr. Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680924 199303 1 010

Perhitungan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja: Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Target : 59,60%
Realisasi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah : Rp. 2.220.122.658.663,55
Realisasi Pendapatan Daerah : RP. 3.562.778.417.859,95

Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$

$\frac{2.220.122.658.663,55}{3.562.778.417.859,95} \times 100 = 62,31\%$

Capaian Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan:

$\frac{\text{Realisasi Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}}{\text{Target Kontribusi PAD terhadap Pendapatan}} \times 100$

$\frac{62,31\%}{59,60\%} \times 100 = 104,55\%$

Indikator Kinerja: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp. 2.018.795.135.284
Realisasi : Rp. 2.220.122.658.663,55
Perhitungan:

$\frac{\text{Realisasi Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$

$\frac{2.220.122.658.663,55}{2.018.795.135.284} \times 100 = 109,97\%$